

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 05/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 05/05/24 5:13 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	74,130	0	74,130	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(371)	0	(371)	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	73,759	0	73,759	0.00
Persediaan	8,238,915	278,463,740	(270,224,825)	(97.04)
JUMLAH ASET LANCAR	8,312,674	278,463,740	(270,151,066)	(97.01)
ASET TETAP				
Tanah	4,736,133,000	4,736,133,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,200,909,531	5,037,270,001	163,639,530	3.25
Gedung dan Bangunan	6,194,588,601	6,194,588,601	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	94,142,000	94,142,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,203,981,364)	(5,754,281,882)	(449,699,482)	7.82
JUMLAH ASET TETAP	10,021,791,768	10,307,851,720	(286,059,952)	(2.78)
JUMLAH ASET	10,030,104,442	10,586,315,460	(556,211,018)	(5.25)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	17,831,425	19,691,798	(1,860,373)	(9.45)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	17,831,425	19,691,798	(1,860,373)	(9.45)
JUMLAH KEWAJIBAN	17,831,425	19,691,798	(1,860,373)	(9.45)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	10,012,273,017	10,566,623,662	(554,350,645)	(5.25)
JUMLAH EKUITAS	10,012,273,017	10,566,623,662	(554,350,645)	(5.25)
JUMLAH EKUITAS	10,012,273,017	10,566,623,662	(554,350,645)	(5.25)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	10,030,104,442	10,586,315,460	(556,211,018)	(5.25)

Keterangan :

FINAL

PALU, 5 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HAMZAH

197007011999031003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



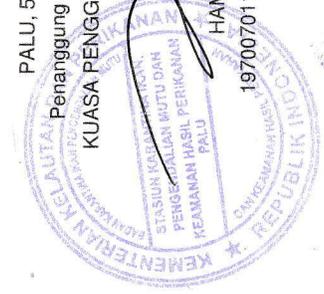
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 032
 DELON I : BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 13
 SATUAN KERJA : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU 649601

Tgl Data : 05/05/24 12:28 AM
 Tgl Cetak : 05/05/24 5:19 AM
 Halaman : 2
 lap_ira_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
	2	4	5	6	7	8	9	10
1								
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Hibah Belanja Negara (B.I + B.II)	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hibah Belanja Negara (B.I + B.II)	5,878,011,000	5,840,692,690	(37,318,310)	99	6,866,700,000	6,861,671,942	(5,028,058)	100
PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

terangan :
 IAL

PALU, 5 Mei 2024
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HAMZAH
 197007011999031003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 05/05/24 12:00 AM

Tgl Cetak : 05/05/24 5:19 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	10,566,623,662	9,662,121,082	904,502,580	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(6,355,361,765)	(5,929,959,878)	(425,401,887)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	8,111	(8,111)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	8,111	(8,111)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,801,011,120	6,834,454,347	(1,033,443,227)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(554,350,645)	904,502,580	(1,458,853,225)	-
EKUITAS AKHIR	10,012,273,017	10,566,623,662	(554,350,645)	-

Keterangan :

FINAL

PALU, 5 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HAMZAH

197007011999031003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH
SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 05/05/24 12:28 AM
Tgl Cetak : 05/05/24 5:18 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	43,160,000	14,552,650	28,607,350	196.578
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	43,160,000	14,552,650	28,607,350	196.578
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	43,160,000	14,552,650	28,607,350	196.578
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,202,044,554	3,146,830,339	55,214,215	1.755
Beban Persediaan	284,713,290	124,834,590	159,878,700	128.072
Beban Barang dan Jasa	1,321,282,027	1,449,183,690	(127,901,663)	(8.826)
Beban Pemeliharaan	570,927,502	326,592,294	244,335,208	74.814
Beban Perjalanan Dinas	569,854,539	319,726,497	250,128,042	78.232
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (1800) SULAWESI TENGAH

SATUAN KERJA : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU

Tgl Data : 05/05/24 12:28 AM

Tgl Cetak : 05/05/24 5:18 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	449,699,482	569,972,546	(120,273,064)	(21.102)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	371	0	371	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	6,398,521,765	5,937,139,956	461,381,809	7.771
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(6,355,361,765)	(5,922,587,306)	(432,774,459)	7.307
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	(2,812,742)	2,812,742	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	11,977,699	(11,977,699)	(100)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	14,790,441	(14,790,441)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	(4,559,830)	4,559,830	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4,559,830	(4,559,830)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	(7,372,572)	7,372,572	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(6,355,361,765)	(5,929,959,878)	(425,401,887)	7.174
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(6,355,361,765)	(5,929,959,878)	(425,401,887)	7.174

Keterangan :

FINAL

PALU, 5 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



[Handwritten Signature]
HAMZAH

197007011999031003



LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir
31 Desember 2023 (AUDITED)

(649601)

**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU**

**Jl. Garuda No 22 Palu, telp : (0451) 482131
email : skipm.palu@kkp.go.id**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

UPT Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan UPT Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada UPT Stasiun KIPM Palu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palu, 29 April 2024

Kepala Stasiun KIPM Palu,



Hamzah, S.Pi, M.Si

NIP 19700701 199903 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	v
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	1
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	1
V. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	2
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	18
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya	41
VI. Lampiran dan Daftar	42

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu tingkat satker selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palu, 29 April 2024

Kepala Stasiun KIPM Palu,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner ring contains 'STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Hamzah, S.Pi, M.Si

NIP 19700701 199903 1 003

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 43.160.000 atau mencapai 177 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 24.425.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp. 5.840.692.690 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 5.878.011.000.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp10.030.104.442 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp8.312.674; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp10.021.791.768; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp17.831.425 dan Rp10.012.273.017.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.160.000, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp6.398.521.765 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.355.361.765). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(0) dan Rp(6.355.361.765) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(6.355.361.765).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp10.566.623.662 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp(6.355.361.765) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas senilai Rp5.801.011.120 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar (554.350.645) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp10.012.273.017.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Palu
LAPORAN REALISASI ANGGARAN****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATA TAN	31 Desember 2023				31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di atas (di bawah)	%	REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.					
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	24,425,000	43,160,000	18,735,000	176.70	28,152,595
Jum Pendpt Negara & Hibah		24,425,000	43,160,000		176.70	28,152,595
B. Belanja Negara	B.2.					
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	3,225,558,000	3,202,118,684	(23,439,316)	99.27	3,146,830,339
2. Belanja Barang	B.2.2.	2,487,453,000	2,474,934,476	(12,518,524)	99.50	2,205,755,834
3. Belanja Modal	B.2.3.	165,000,000	163,639,530	(1,360,470)	99.18	1,509,085,769
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Negara		5,878,011,000	5,840,692,690	(37,318,310)	99.37	6,861,671,942

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Palu
NERACA**

PER 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Belanja Dibayar Dimuka	C.1.2	0	0
Piutang Bukan Pajak		74,130	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(371)	0
Piutang Bukan Pajak (Netto)		73,759	0
Persediaan	C.1.3	8,238,915	278,463,740
Jumlah Aset Lancar		8,312,674	278,463,740
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	4,736,133,000	4,736,133,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	5,200,909,531	5,037,270,001
Gedung dan Bangunan	C.2.3	6,194,588,601	6,194,588,601
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.2.4	94,142,000	94,142,000
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(6,203,981,364)	(5,754,281,882)
Jumlah Aset Tetap		10,021,791,768	10,307,851,720
Aset Lainnya	C.2		
Aset Lain-lain	C.2.7	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.2.8	0	0
Jumlah Aset Lainnya		0	0
JUMLAH ASET		10,030,104,442	10,586,315,460
KEWAJIBAN	C.3		
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada pihak Ke tiga	C.3.1	17,831,425	19,691,798
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.3.2	0	
Uang Muka KPPN	C.3.3	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17,831,425	19,691,798
JUMLAH KEWAJIBAN		17,831,425	19,691,798
EKUITAS	C.4	10,012,273,017	10,566,623,662
Jumlah Ekuitas	C.4.1	10,012,273,017	10,566,623,662
JUMLAH EKUITAS DANA		10,012,273,017	10,566,623,662
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		10,030,104,442	10,586,315,460

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	43,160,000	14,552,650
JUMLAH PENDAPATAN		43,160,000	14,552,650
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	3,202,044,554	3,146,830,339
Beban Persediaan	D.3	284,713,290	124,834,590
Beban Barang dan Jasa	D.4	1,321,282,027	1,449,183,690
Beban Pemeliharaan	D.5	570,927,502	326,592,294
Beban Perjalanan Dinas	D.6	569,854,539	319,726,497
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada	D.7	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	449,699,482	569,972,546
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		371	0
Jumlah Beban Operasional		6,398,521,765	5,937,139,956
JUMLAH BEBAN		6,398,521,765	5,937,139,956
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		(6,355,361,765)	(5,922,587,306)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0	(2,812,742)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	0	11,977,699
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	14,790,441
Jumlah surplus (Defisit) pelepasan aset non lancar		0	(2,812,742)
Surplus(Defisit) dari non kegiatan	D.11	0	(4,559,830)
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	D.12	0	0
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya		0	4,559,830
Jumlah Surplus(Defisit) dari kegiatan non operasional Lainnya		0	(4,559,830)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN		0	(7,372,572)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.15	0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(6,355,361,765)	(5,929,959,878)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Palu
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 DAN 2022***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS AWAL	E.1	10,566,623,662	9,662,121,082
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(6,355,361,765)	(5,929,959,878)
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS		-	8,111
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVA	E.5	-	8,111
LAIN LAIN	E.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	5,801,011,120	6,834,454,347
KENAIKAN / PENURUNAN ENTITAS		(554,350,645)	904,502,580
EKUITAS AKHIR		10,012,273,017	10,566,623,662

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Keuangan***

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu yang kemudian disingkat nomenklaturnya menjadi Stasiun KIPM Palu didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 23/PERMEN-KP/2015, Stasiun KIPM Palu yang berkedudukan di Jalan Garuda No 22 mempunyai tugas Menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugas Stasiun KIPM Palu menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Kebijakan teknis pada tahun 2019 antara lain pemeriksaan media pembawa dengan organoleptik dan pelaksanaan Inpres 01 Tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Melalui pengawasan terpadu terhadap mutu dan kesehatan pangan.
- b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan.
- d. Pelaksanaan administrasi UPT BKIPM.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri melalui BKIPM.

Melalui peran Kantor Stasiun KIPM Paludi Sulawesi Tengah diharapkan kualitas Laporan Keuangan Satker dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2023 dan 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Palu). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasional keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan UPT Stasiun KIPM Paludalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konskuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.

Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ,

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,

Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga	100%

	tidak dilakukan pelunasan	
--	---------------------------	--

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

Tanah;

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen

sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d.Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

AsetLainnya

e.Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak

dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2022 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UPT Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.878.011.000. Selama tahun 2023, dilakukan revisi atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal sebanyak 7 kali yang disebabkan adanya penyesuaian halaman III DIPA dan penambahan belanja pegawai. Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2023

(dalamRupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	2.000.000	2.000.000
Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi Lainnya	22.425.000	22.425.000
Jumlah Pendapatan	24.425.000	24.425.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.160.107.000	3.225.558.000
Belanja Barang	2.487.453.000	2.487.453.000
Belanja Modal	165.000.000	165.000.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	5.812.560.000	5.878.011.000

Realisasi Pendapatan
Rp43.160.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 43.160.000 atau mencapai 123,81 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 24.425.000. Pendapatan di satuan kerja lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Jasa Karantina, dan Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standarisasi dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2023
(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1. Pendapatan jasa karantina perikanan	2.000.000	3.620.000	181,00
2. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi	22.425.000	39.540.000	176,32
3. Pendapatan denda penyelesaian pekerja	0	0	0,00
4. Penerimaan kembali belanja Pegawai TA	0	0	0,00
5. Pendapatan dari penjualan peralatan dan	0	0	0,00
Jumlah	24.425.000	43.160.000	176,70

Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2023 dan TA 2022 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBPN pada periode 2023 mengalami kenaikan **34,77** persen dari realisasi pendapatan Periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan masyarakat umum untuk pengujian PIK pada ikan Nila di Sulawesi Tengah serta pendapatan dari sertifikasi Ekspor di Stasiun KIPM Palu.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	3,620,000	2,220,000	38.67
2. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	11,977,699	-
3. Penerimaan kembali belanja pegawai T	-	1,622,246	-
4. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	-	-	-
5. Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan standarisasi lainnya	39,540,000	12,332,650	68.81
Jumlah Pendapatan	43,160,000	28,152,595	34.77

Realisasi Belanja
Rp5.840.692.690

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.840.692.690 atau 99,37% dari anggaran belanja sebesar Rp5.878.011.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	3.225.558.000	3.202.118.684	
Belanja Barang	2.487.453.000	2.474.934.476	
Belanja Modal	165.000.000	163.639.530	
Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	5.878.011.000	5.840.692.690	99,37
Pengembalian Belanja		-	0
Belanja Netto	5.878.011.000	5.840.692.690	99,37

Realisasi Belanja Per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (17,48) persen dibandingkan realisasi belanja Per31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan antara

lain :

1. Pada tahun 2022 terdapat realisasi belanja modal untuk pembayaran renovasi Gedung Kantor Stasiun KIPM Palu Tahun 2021 (Pembayaran Carry Over)
2. Peningkatan realisasi belanja pegawai disebabkan terdapat pengangkatan CPNS menjadi PNS 1 pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan grade tunjangan kinerja, kenaikan gaji berkala dan penerimaan 1 orang pegawai PPPK.
3. Peningkatan realisasi belanja barang disebabkan adanya kenaikan tarif listrik dikarenakan perubahan gedung menjadi 2 lantai dan kenaikan biaya pemeliharaan gedung kantor utama yang sebelumnya 1 lantai menjadi 2 lantai.

Perbandingan Realisasi Belanja
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	REALISASI PER 31 Desember 2023	REALISASI PER 31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3.202.118.684	3.146.830.339	1,73
Belanja Barang	2.474.934.476	2.205.755.834	10,88
Belanja Modal	163.639.530	1.509.085.769	(822,20)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
Jumlah Belanja	5.840.692.690	6.861.671.942	(17,48)

*Belanja Pegawai
Rp3.202.118.684*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.202.118.684 dan Rp3.146.830.339. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,73 persen dari TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pengangkatan pegawai CPNS menjadi PNS.
2. Adanya kenaikan pangkat, kenaikan grade tunjangan kinerja dan kenaikan gaji berkala pegawai.
3. Adanya penerimaan pegawai PPPK sebanyak 1 orang

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Belanja Gaji Pokok PNS	1,166,483,820	1,196,740,390	(2.59)
Belanja pembulatan gaji PNS	19,773	20,862	(5.51)
Belanja Tunj Suami/ Istri	90,600,200	87,509,180	3.41
Belanja Tunj Anak	22,705,876	22,670,070	0.16
Belanja Tunj Struktural PNS	17,640,000	15,480,000	12.24
Belanja Tunj Fungsional	52,580,000	60,175,000	(14.44)
Belanja Tunj PPh PNS	451,400	383,200	15.11
Belanja Tunj Beras PNS	71,913,060	72,492,420	(0.81)
Belanja Uang Makan PNS	204,594,000	221,236,000	(8.13)
Belanja Tunj Umum PNS	25,330,000	23,300,000	8.01
Belanja Uang Lembur	53,686,000	85,422,000	(59.11)
Belanja Tunjkin Pegawai	1,449,238,791	1,361,650,758	6.04
Belanja Gaji Pokok PPPK	14,832,500		
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	145		
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,483,250		
Belanja Tunjangan Anak PPPK	593,300		
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,375,000		
Belanja Tunjangan Beras PPPK	1,448,400		
Belanja Uang Makan PPPK	3,182,000		
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus /Kegiatan/Kinerja PPPK	23,961,415		
Jumlah Belanja Kotor	3,202,118,930	3,147,079,880	
Pengembalian Belanja Pegawai	246	249,200	-
Jumlah Belanja Bersih	3,202,118,684	3,146,830,680	1.73

Belanja Barang
Rp2.474.934.476

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.474.934.476 dan Rp2.205.755.834. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 11,05 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini disebabkan, pada tahun 2023 terdapat kegiatan pemeliharaan kantor, kenaikan tarif listrik dan realisasi kegiatan teknis yaitu Pekan Pelayanan Publik dan Pencanaan WBK WBBM.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik(Turun %)
Belanja Barang Operasional	851.897.246	949.567.199	(11,46)
Belanja Barang Non Operasional	77.343.798	41.023.597	46,96
Belanja Jasa	394.774.656	430.742.297	(9,11)
Belanja Pemeliharaan	420.533.167	303.998.994	27,71
Belanja Barang Persediaan	161.404.370	160.697.250	0,44
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	573.871.489	319.726.497	44,29
Jumlah Belanja Kotor	2.479.824.726	2.205.755.834	11,05
Pengembalian belanja	4.890.250	-	
Jumlah Belanja Bersih	2.474.934.476	2.205.755.834	11,05

*Belanja Modal
Rp163.639.530*

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp163.639.530 dan Rp1.454.285.769. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami penurunan >100 persen dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Adapun rincian sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.639.530	42.000.000	>100
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.412.285.769	100
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	163.639.530	1.454.285.769	(100)
Pengembalian Belanja Modal	0	-	-
Jumlah Belanja Modal	163.639.530	1.454.285.769	(100)

*Belanja Modal Tanah
Rp0*

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak ada Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain: Tidak terdapat anggaran Belanja Modal Tanah tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Tanah
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp163.639.530*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022 adalah sebesar Rp163.639.530 dan Rp42.000.000. Hal ini disebabkan karena adanya kegiatan pencaanangan Zona Integritas, sehingga UPT Stasiun KIPM Palu menambahkan peralatan dan mesin sebagai fasilitas gedung untuk menunjang kegiatan pelayanan yang lebih baik. Adapun penambahan tersebut adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realiasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	Naik (Turun) %
Sice	44,788,500		-
Kursi Besi/Metal	8,951,040		
Laptop	32,989,200	42,000,000	
A.C. Split	16,466,850		
Meja Receptionist	24,919,500		
Kursi Dorong	35,524,440		
Jumlah Belanja Kotor	163,639,530	42,000,000	0.00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	163,639,530	42,000,000	0.00

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp1.412.285.769. Tidak terdapat belanja Gedung dan Bangunan di Kantor satker SKIPM Palu pada Tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	31-Dec-23	31-Dec-22	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	1.412.285.769	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	1.412.285.769	-100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	1.412.285.769	-100,00

*Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan antara lain: Tidak terdapat anggaran belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023.

TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	30-Sep-23	30-Sep-22	Naik (Turun) %
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

*Belanja Modal
Lainnya Rp0*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal lainnya per 31 Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak terdapat realisasi belanja bantuan sosial pada per 31 Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	%
	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	0	0	0

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp8.312.674

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.8.312.674 dan Rp278.463.740.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan(UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada UPT Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp60.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP yang belum di SPM kan	0	0
Jumlah	0	0

Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada masing-masing Satker disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0, yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam

jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Rincian Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2023	Tahun 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.1.4. Piutang PNB

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Rp0

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
6.		-	-

	Jumlah	-	-
--	---------------	---	---

Bagian Lancar
Tagihan
Penjualan
Angsuran
Rp0

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Rincian Bagian Lancar TPA untuk masing-masing Satker disajikan sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.		-	-
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-
	Jumlah	-	-

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang Jk.
Pendek Rp0

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih UPT Stasiun KIPM Paluper 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, yang merupakan estimasi atas ketidak tertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan kategori piutang per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Pendek

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0,5%	-

Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-		-

Beban Dibayar di Muka Rp0

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka UPT Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Pembayaran Internet	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah	0	0

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima UPT Stasiun KIPM Palu per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2023 dan 2022*

Jenis	Tahun 2023	Tahun 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	0	0
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp8.238.915

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp8.238.915 dan Rp278.463.740 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	3,134,740	897,600
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	7,000
3	Suku Cadang	69,375	141,706,340
4	Pita, Cukai, Materai dan Legis	-	-
5	Bahan Baku	5,034,800	135,852,800
6	Persediaan lainnya	-	-
	Jumlah	8,238,915	278,463,740

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp10.021.791.768

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.021.791.768 dan Rp10.307.851.720

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada UPT Stasiun KIPM Palu berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp4.736.133.000

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki oleh Daerah/UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp4.736.133.000 dan Rp4.736.133.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2023	Rp 4,736,133,000
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	Rp -
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 4,736,133,000
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2023	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp 4,736,133,000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Lokasi	Luas	Nilai
1	Jl. Garuda No. 22 Palu	1740 m2	4.445.700.000
2	Jl. Yos Sudarso Tolitoli	721 m2	290.433.000
Jumlah		-	4.736.133.000

Peralatan dan
Mesin
Rp5.200.909.531
31

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.200.909.531 dan Rp5.037.270.001 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Per 01 Januari 2023	5,037,270,001
Mutasi Tambah	
Pembelian	163,639,530
mutasi kurang	
Penghapusan	-
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	5,200,909,531
Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2023	(4,460,534,698)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	740,374,833

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin yang diperoleh dari penambahan nilai berupa :

- Kursi besi/metal Rp. 8.951.040
- Sice Rp. 44.788.500
- Meja resepsionis Rp. 24.919.500
- AC Split Rp. 16.466.850
- Kursi dorong Rp. 35.524.440
- Peralatan personal Laptop Rp. 32.989.200

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin yang masih digunakan senilai Rp. 4.460.534.698

Gedung dan
Bangunan
Rp6.194.588.601

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp6.194.588.601 dan Rp6.194.588.601. Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023

(dalam rupiah)

Saldo Per 01 Januari 2023	6,194,588,601
Mutasi Tambah	
Pengembangan	-
mutasi kurang	-
Penghapusan	-
Transfer keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	6,194,588,601
Akumulasi penyusutan s.d 31 Desember 2023	(1,721,210,795)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	4,473,377,806

Rincian Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp94.142.000

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp94.142.000 dan Rp94.142.000 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2023	94,142,000
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	94,142,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(22,235,871)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	71,906,129

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya per 31 Desember 2023 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Saldo per 01 Januari 2023	-
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian KDP pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	No. Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1.					
2.					
	Jumlah				

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp6.203.981.
364

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6.203.981.364 dan Rp5.754.281.882.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Tanah	4.736.133.000	0	4.736.133.000
2.	Peralatan dan Mesin	5.200.909.531	(4.460.534.698)	740.374.833
3.	Gedung dan Bangunan	6.194.588.601	(1.721.210.795)	4.473.377.806
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	94.142.000	(22.235.871)	71.906.129
5.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	16.225.773.132	6.203.981.364.	10.021.791.768

Piutang
Jangka
Panjang
Rp0

C.3. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal

pelaporan.

Piutang
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp0

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing Satker adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan TP/TGR TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Stasiun KIPM Palu	-	-
2.	Stasiun KIPM	-	-
	Jumlah	0	0

Tagihan
Penjualan
Angsuran Rp0

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, berupa penjualan aset tetap yang pembayarannya diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian TPA per Satker Tahun 2022 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang TPA TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
1.	Stasiun KIPM Palu	-	-
2.	Stasiun KIPM	-	-
	Jumlah	0	0

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih –
Piutang
Jangka
Panjang Rp0

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut.

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. Panjang
TA 2023

(dalam rupiah)

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Tagihan TPA			
Lancar	-	0,5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	0		0
Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0		0

Aset Lainnya
Rp0

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Aset Tak Berwujud
Rp0

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1.		0
2.		0
	Jumlah	0

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Adapun mutasi Aset Tak Berwujud pada UPT Stasiun KIPM Palu – adalah sebagai berikut.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Aset Lain-Lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional UPT Stasiun KIPM Palu – dan Pelaporan Keuangan serta dalam proses penghapusan dari BMN, dan kas BLU yang dibatasi penggunaannya.

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Mutasi Aset Lain-lain

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	-
Mutasi Kurang:	
Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Penghapusan BMN	-
Saldo Per 31 Desember 2023	-
Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan
dan
Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya TA 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.		0	0	0
2.		0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan

metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban
Jangka
Pendek
Rp17.831.425

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek UPT Stasiun KIPM Palu – per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp17.831.425 dan Rp19.691.798.

Uang Muka
dari KPPN Rp0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satker lingkup UPT Stasiun KIPM Palu adalah sebagai berikut:

Rincian Uang Muka dari KPPN TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023
1.	Stasiun KIPM Palu	0
2.		0
3.		0
	Jumlah	0

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp17.831.425

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.831.425 dan Rp19.691.798. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup UPT Stasiun KIPM Palu – per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Belanja Layanan Telepon	2.815.530	Pembayaran telepon bulan desember 2023
2.	Belanja layanan listrik	15.015.895	Pembayaran listrik bulan desember 2023
	Total	17.831.425	

Pendapatan
Diterima di
Muka Rp0

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

Rincian Pendapatan Diterima di Mukadari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka TA 2023
(dalam rupiah)*

Uraian	Jumlah	Keterangan
Jumlah		

Beban yang
Masih Harus
Dibayar
Rp17.831.425

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp17.831.425. dan Rp19.691.798, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar TA 2023 dan 2022
(dalam rupiah)*

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai yang Masih HarusDibayar	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	17.831.425	19.691.798
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	-	-
Jumlah	17.831.425	19.691.798

Ekuitas
Rp10.012.273.01
7

C.7 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing- masing sebesar Rp10.012.273.017 dan Rp10.566.623.662. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNB
Rp43.160.000

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp43.160.000 dan Rp22.749.895. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022	NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan Jasa Sensor Karantina	3,620,000	1,180,000	67.40
2. Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi	39,540,000	10,747,650	72.82
3. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan M	-	9,199,999	100.00
4. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	1,622,246	100.00
Jumlah Pendapatan	43,160,000	22,749,895	47.29

Pendapatan Jasa merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari jasa pemeriksaan laboratorium terhadap produk perikanan yang akan dilalulintaskan. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 47,29%. Hal ini disebabkan adanya permintaan pengujian dari masyarakat umum yang meningkat untuk pengujian PIK dan Mutu Perikanan.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp.3.202.044.554

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.202.044.554 dan Rp3.146.830.339. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BELANJA	2023	2022	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1,166,483,820	1,196,740,390	(2.59)
Beban Pembulatan Gaji PNS	19,773	20,862.	(5.51)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	90,600,200	87,509,180.	3.41
Beban Tunj. Anak PNS	22,705,876	22,670,070.	0.16
Beban Tunj. Struktural PNS	17,640,000	15,480,000.	12.24
Beban Tunj. Fungsional PNS	52,580,000	60,175,000.	(14.44)
Beban Tunj. PPh PNS	451,400	383,200.	15.11
Beban Tunj. Beras PNS	71,913,060	72,492,420.	(0.81)
Beban Uang Makan PNS	204,594,000	221,236,000.	(8.13)
Beban Tunjangan Umum PNS	25,330,000	23,300,000.	8.01
Beban Gaji Pokok PPPK	14,832,500		100.00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	145		100.00
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	1,483,250		100.00
Beban Tunjangan Anak PPPK	593,300		100.00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,375,000		100.00
Beban Tunjangan Beras PPPK	1,448,400		100.00
Beban Uang Makan PPPK	3,182,000		100.00
Beban Uang Lembur	53,686,000	85,422,000.	(59.11)
Khusus/ Kegiatan)	1,449,164,661	1,361,650,758.	6.04
Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiata	23,961,415		100.00
Jumlah Belanja Kotor	3,202,044,800	3,147,079,880	1.72
Pengembalian Belanja Pegawai	246	249,541	-
Jumlah Belanja Bersih	3,202,044,554	3,146,830,339	1.72

*Beban Persediaan
Rp284.713.290*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.284.713.290 dan Rp124.834.590. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Persediaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Beban Persediaan Konsumsi	71,932,890	60,226,690
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
4	Pita, Cukai, Materai dan Legis	-	-
5	Beban Persediaan bahan baku	212,780,400	64,607,900
6	Persediaan lainnya	-	-
	Jumlah	284,713,290	124,834,590

Beban Barang dan
Jasa
RpRp1.320.968.727

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.1.320.968.727 dan Rp 1.449.183.690. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi Kenaikan Beban Barang dan Jasa, hal ini disebabkan peningkatan beberapa pos beban seperti beban langganan listrik, beban pengiriman surat dan beban bahan seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan dan diklat. Walaupun secara total beban barang dan jasa mengalami penurunan yaitu pada beberapa pos beban karena penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan beban sewa yang disebabkan tidak adanya sewa kantor skipm palu seperti saat pembangunan kantor skipm palu tahun 2023. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	Naik(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	563,229,196.	596,910,699.	(5.98)
Beban Penambah daya tahan tubuh	74,517,350.	82,834,000.	(11.16)
Beban Pengiriman Surat Dinas	4,867,400.	2,087,100.	57.12
Beban Honor Operasional Satker	126,242,000.	102,498,000.	18.81
Beban Barang Operasional Lainnya	83,041,300.	139,497,400.	(67.99)
Beban Barang Ops - Penanganan Covid19	-	25,740,000.	100.00
Beban Bahan	67,683,798.	31,363,597.	53.66
Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000.	8,160,000.	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1,500,000.	1,500,000.	-
Beban Langganan Listrik	215,905,688.	176,873,931.	18.08
Beban Langganan Telepon	39,203,177.	43,832,413.	(11.81)
Beban Langganan Air	1,173,750.	762,150.	35.07
Beban Sewa	54,944,000.	115,768,000.	(110.70)
Beban Jasa Profesi	6,300,000.	-	100.00
Beban Jasa Lainnya	75,074,368.	120,233,400.	(60.15)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid19	-	1,123,000	-
Jumlah	1,321,842,027	1,449,183,690	(9.63)
Pengembalian Honor Operasional	873,300	-	
Jumlah Keseluruhan	1,320,968,727	1,449,183,690	(9.71)

Beban
Pemeliharaan
Rp.570.927.502

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp570.927.502 dan 326.592.294. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023

dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik / Turun
1	Beban Pemeliharaan Gedung bangunan	198,490,726.	103,938,887.	(90.97)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222,042,441.	200,060,107.	(10.99)
3	Beban Persediaan untuk pemeliharaan	4,687,000.	9,343,900.	49.84
4	Beban Persediaan suku cadang	145,707,335.	13,249,400.	(999.73)
Jumlah		570,927,502	326,592,294	(74.81)

*Beban Perjalanan Dinas
Rp565.837.589*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.565.837.589 dan Rp319.726.497. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya frekuensi perjalanan dinas pegawai untuk menghadiri kegiatan koordinasi dimana perjalanan dinasnya ditanggung sendiri oleh masing-masing satuan kerja. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	2023	2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	237,097,000.	139,709,000.	41.08
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,150,000.	25,200,000.	30.29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	296,607,539.	154,817,497.	47.80
Jumlah	569,854,539	319,726,497	43.89
Pengembalian perjalanan dinas	4,016,950.		
Jumlah	565,837,589	319,726,497	43.50

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Beban			

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Jumlah Beban			

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp449.699.482

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.449.699.482 dan Rp292.083.228. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	313.742.898	434.015.962	40.48

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	132.535.681	132.535.681	50.00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.420.903	3.420.903	50,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Penyusutan	449.699.482	569.972.546	42,75
Beban Amortisasi Software	0	0	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	0	0	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0	-
Jumlah Amortisasi	0	0	-
Jumlah Beban	449.699.482	569.972.546	42.75

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2022	2022	%
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah Beban	0	0	0

Kegiatan Non Operasional Rp(0)

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidakrutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	2023	2022	%
Pendapatan pelepasan asset non Lancar	-	-	-
Beban pelepasan asset non lancar	-	-	-
Beban dari keg. Non operasional lainnya	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah Beban	0	0	0

Pos Luar Biasa Nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp10.566.623.662*

E.1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.566.623.662 dan Rp9.662.121.082.

*Defisit LO
Rp(6.355.361.765)*

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah defisit sebesar Rp(6.355.361.765) dan Rp(5.929.959.878). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

*Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi
Rp0*

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0.

*Penyesuaian Nilai Aset
Rp0*

E.1.1. Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan
Rp0*

E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan TA 2023

No.	Jenis Persediaan	Koreksi
1.	Barang Konsumsi	0
2.	Suku Cadang	0
3.	Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0
4.	Barang Persediaan Lainnya	0
Jumlah		0

*Selisih Revaluasi Aset
Rp0*

E.4.3. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0

E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp(0).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi TA 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Aset Tetap Non Revaluasi	0
Jumlah	0

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp(0) dan Rp8.111.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang. Rincian Koreksi Lain-lain adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain TA 2023

Jenis Koreksi	Jumlah
	2022
Koreksi penyisihan piutang	8.111
Jumlah	8.111

Transaksi Antar
Entitas
Rp5.801.011.120

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp5.801.011.120 dan Rp6.834.454.347.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Transaksi Antar Entitas TA 2023

Jenis Persediaan	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(43.160.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	5.840.692.690
Transfer Masuk	3.478.430
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	5.801.011.120

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas

Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp(43.160.000) sedangkan DKEL sebesar Rp5.840.692.690.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp3.478.430 terdiri dari:

Transfer Masuk TA 2023

No.	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Sertifikat Kesehatan Ikan	Sekretariats Badan KIPM - KKP	3.478.430
Jumlah			3.478.430

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 yang merupakan transfer Persediaan ke tempat lain.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dari total Rp0 yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Pengesahan Hibah Langsung TA 2023

No.	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1.		Uang	
		Barang	
Total Pengesahan			
Pengesahan Pengembalian Hibah			-
Jumlah			

Ekuitas Akhir
Rp10.012.273.017

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp10.012.273.017 dan Rp10.566.623.662.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Pada tanggal 31 Desember 2023 telah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN melalui aplikasi SAKTI dan SPAN dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.17.831.425 yang terdiri tagihan listrik bulan Desember 2023 sebesar Rp.15.015.895 dan tagihan telepon bulan Desember 2023 sebesar Rp.2.815.530 yang telah dibuatkan Jurnal Memo Penyesuaiannya.

F.2 Pengungkapan Lain-lain

- Terdapat akun piutang lainnya sebesar Rp.74.130,- yaitu pengembalian tunjangan kinerja bulan desember pegawai Stasiun KIPM Palu dikarenakan terlambat absen masuk. Sehingga terdapat penyisihan piutang tidak tertagih – piutang bukan pajak sebesar Rp.371,-. Daftar pengembalian tunjangan kinerja bulan Desember 2023 Stasiun KIPM Palu dilampirkan pada lampiran CALK.

VII. Lampiran dan daftar

1. LPJ Bendahara Pengeluaran

LEMBAR BUKTI VALIDASI LPJ BENDAHARA

Jenis LPJ : LPJ Bendahara Pengeluaran
 Periode LPJ : 2023-12
 Sequence LPJ : 00003/LPJI/64960100/12/2023
 Kode Satker : 649601
 Nama Satker : STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU
 Tanggal Kirim : 04/01/2024 17:27

Telah dilakukan validasi melalui SAKTI oleh Seksi Verifikasi Akuntansi/Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Palu (051) dengan timestamp 04/01/2024 18:52 WITA.

Petugas Validator LPJ :
 Staf : RIKA LAURA LISABETH GINTING pada 04/01/2024 18:05.
 Kasi : DONNY AJI NUGROHO pada 04/01/2024 18:52.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
 Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Tgl. No. SP : 30 November 2022 , DIPA-032.13.2.649601/2023
 Unit Organisasi : (13) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Tahun : 2023
 Provinsi/Kabupaten/Kota : (18.51) SULAWESI TENGAH / KOTA PALU KPPN : (051) Palu
 Satuan Kerja : (649601) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PALU
 Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00187/DRPP/649601/2023

Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5
A BP Kas, BPP dan UM	60.000.000,00	302.015.995,00	362.015.995,00	0,00
1. BP Kas (Tunai & Bank)	60.000.000,00	302.015.995,00	362.015.995,00	0,00
2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B BP Selain Kas	60.000.000,00	122.397.984,00	182.397.984,00	0,00
1. BP UP*)	60.000.000,00	119.759.973,00	179.759.973,00	0,00
2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
4. BP Pajak	0,00	2.638.011,00	2.638.011,00	0,00
5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Jumlah penarikan surat tercatat kwitansi IIP yang belum di-SDM-kan sebesar Rp. 0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

-
-

Mengetahui
 Kepala Pengguna Anggaran

 HAMZAH
 N.P. 197907011999031003

KOTA PALU, Desember 2023
 Bendahara Pengeluaran

 MUHLIS
 III/A 198308052009101001

2. LPJ Penerimaan

Hasil Pemeriksaan Kas Periode Desember 2023

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan		
A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	0
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNB	Rp.	0
2. BP DPK	Rp.	0
3. BP Pajak	Rp.	0
4. BP Lainnya	Rp.	0
5. Jumlah	Rp.	0
C. Selisih Pembukuan (A-B5)		
	Rp.	0
II. Hasil Pemeriksaan Kas		
A. Kas yang dikuasai bendahara		
1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0
B. Selisih Kas (II.A.3)	Rp.	0
III. Hasil Rekonsiliasi Internal		
A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	4.255.000
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 4.255.000
IV. Penjelasan atas selisih		
A. Selisih Kas (II.B)		
Tidak terdapat selisih kas		
B. Selisih Pembukuan UP (III.C)		
Bahwa selisih disebabkan karena proses upload data dari ADK Simponi		

Bendahara Penerimaan



ANDRAT YANI MONTOLURE
PENATA TINGKAT I 198502012009031001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HAMZAH

IV.a 197007011999031003

3. Memo Tagihan Listrik

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Eselon I : Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Wilayah : Sulawesi Tengah
 Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu
 No Dokumen : 00001
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Tagihan Listrik Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan yang masih harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyusutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522111	Belanja Langganan Listrik	Rp. 15.015.895	
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus di Bayar		Rp. 15.015.895

Dibuat oleh :  Tanggal : 31 Desember 2023

Ditetujui oleh :  Tanggal : 31 Desember 2023

Direkam oleh :  Tanggal : 31 Desember 2023

**KARTU BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Desember 2023**

1	2	3	4	5	6
No	Nama Rekanan	Nilai Beban	Jangka Waktu	Tanggal	Terbayar
1	Belanja Langganan Listnk	Rp. 15.015.895	1 Bulan	31 Desember 2023	Rp. 15.015.895
Total					Rp. 15.015.895

4. Memo Internet dan Telp

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Eselon I : Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Wilayah : Sulawesi Tengah
 Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu
 No Dokumen : 00002
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Tagihan Telepon Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

<input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka	<input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban
<input type="checkbox"/> Pendapatan yang masih harus diterima	<input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Dimuka	<input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
<input checked="" type="checkbox"/> Belanja yang Masih Harus Dibayar	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang
<input type="checkbox"/> Koreksi Beban Aset	<input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek
<input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang	<input type="checkbox"/> Transfer Masuk
<input type="checkbox"/> Penyisutan Aset	<input type="checkbox"/> Transfer Keluar
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Penerimaan	<input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca
<input type="checkbox"/> Kas di Bendahara Pengeluaran	<input type="checkbox"/> Koreksi
<input type="checkbox"/> Persediaan	

No	Dirk	Kode Akun	Urutan Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522112	Belanja Langgananan Telepon	Rp. 2.815.530	Rp. 2.815.530
	K	212112	Belanja Barang yang masih harus di Bayar		

Dibuat oleh: 
 Abdul Rahman, S.AP
 Tanggal: 31 Desember 2023

Disetujui oleh: 
 Hanzah, S.Pi, M.Si
 Tanggal: 31 Desember 2023

Direkam oleh: 
 Abdul Rahman, S.AP
 Tanggal: 31 Desember 2023

**KARTU BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR
Desember 2023**

1	2	3	4	5	6
No	Nama Rekanan	Nilai Beban	Jargka Waktu	Tanggal	Terbayar
1	Belanja Langgananan Telepon	Rp. 2.815.530		31 Desember 2023	Rp. 2.815.530
Total					Rp. 2.815.530

5. Memo Pengembalian Tukin

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Eselon I : Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Wilayah : Sulawesi Tengah
 Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu
 No Dokumen : 00003
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Beban Pegawai (PengembalianTukinDesember)

Kategori Jurnal Umum

Peninjauan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Koreksi Antar Beban
 Lalu Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
 Beban Pegawai (Tanggungkhusus/ kinerja/ kegiatan) Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
 Belanja Dibayar Dimuka Piutang Lainnya
 Belanja yang Masih Harus Dibayar

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	Rp. 74.130	
	K	512411	Beban Pegawai		Rp. 74.130

Dibuat oleh:  Disetujui oleh:  Direkam oleh: 
 Tanggal: 31Desember 2023 Tanggal: 31Desember 2023 Tanggal: 31Desember 2023

1	2	3	4	5	6	7
No	Kategori Jurnal Umum	Nilai Piutang	Jangka Waktu	Tanggal	Terbayar	Piutang
1	Piutang Lainnya	Rp. 74.130	1 Bulan	31 Desember 2023	Rp. 74.130	-
Total					Rp. 74.130	

6.

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/ Lembaga : Kementerian Kelautan dan Perikanan
 Eselon I : Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
 Wilayah : Sulawesi Tengah
 Satuan Kerja : Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu
 No Dokumen : 00004
 Tanggal : 31 Desember 2023
 Tahun Anggaran : 2023
 Keterangan : Penyisihan piutang pengembalianTukinPegawai Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian

Pendapatan Diterima Dimuka Koreksi Antar Beban
 Pendapatan yang masih harus diterima Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
 Belanja Dibayar Dimuka Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
 Beban yang Masih Harus Dibayar Pembentukan Piutang Jangka Panjang
 Koreksi Beban Aset Pembentukan Piutang Jangka Pendek
 Penghapusan Piutang Transfer Masuk
 Penyisihan piutang Transfer Keluar
 Kas di Bendahara Penerimaan Reklasifikasi Neraca
 Kas di Bendahara Pengeluaran Koreksi
 Persediaan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	594212	Beban penyisihan piutang lainnya	Rp. 371	
	K	116212	PenyisihanPiutangtidaktertagih - piutanglainnya		Rp. 371

Dibuat oleh:  Disetujui oleh:  Direkam oleh: 

1	2	3	4	5	6
No	Nama Rekanan	Nilai Beban	Jangka Waktu	Tanggal	Terbayar
1	KoreksiLainnya	Rp. 371	1 Bulan	31 Desember 2023	Rp. 371
Total					